

REFLEKSI KRITIS DAN ANALISIS STUDI KASUS KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SERTA REKOMENDASI PERBAIKANNYA

Nurmala Anggun Rahayu¹, Yudo Handoko²

^{1,2}Universitas Jambi

[1nurmalaanggunrahayu8899@gmail.com](mailto:nurmalaanggunrahayu8899@gmail.com), [2yudo@unja.ac.id](mailto:yudo@unja.ac.id)

ABSTRACT

This study examines critical reflections and case study analyses of policy implementation within the Indonesian education system, focusing on persistent challenges such as policy inconsistency, unequal access to quality education, and gaps between policy design and field execution. The objective of this research is to analyze the effectiveness of selected educational policies and to formulate strategic recommendations for improvement. This study employs a qualitative approach using a literature review and case study method, drawing on recent scholarly sources, government reports, and documented educational practices. The findings indicate that many policies, although conceptually progressive, face significant obstacles in implementation due to limited resources, inadequate teacher training, and weak monitoring systems. Furthermore, disparities between urban and rural educational contexts exacerbate the issue. The study concludes that strengthening policy coherence, improving stakeholder collaboration, and enhancing capacity-building initiatives are essential to achieving sustainable educational reform. These findings provide actionable recommendations aimed at improving policy effectiveness and ensuring equitable education outcomes across Indonesia

Keywords: Education Policy, Critical Reflection, Case Study

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji refleksi kritis dan analisis studi kasus terhadap implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan fokus pada berbagai permasalahan seperti inkonsistensi kebijakan, ketimpangan akses pendidikan, serta kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang strategis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis studi kasus dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah terkini, laporan pemerintah, serta praktik pendidikan yang terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang secara konseptual sudah baik, namun mengalami kendala dalam implementasi akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, serta lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut memperparah permasalahan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konsistensi kebijakan, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan kapasitas yang

berkelanjutan guna mewujudkan reformasi pendidikan yang efektif dan merata di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Refleksi Kritis, Studi Kasus

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan suatu bangsa, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan global. Di Indonesia, dinamika kebijakan pendidikan terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam merespons tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan digitalisasi, globalisasi, dan kompleksitas sosial. Namun demikian, berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah seringkali belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar dalam sistem pendidikan, seperti ketimpangan akses, rendahnya mutu pembelajaran, serta lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah (Kemendikbudristek, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas di lapangan yang membutuhkan analisis lebih mendalam.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Program transformasi pendidikan seperti Kurikulum Merdeka yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh wilayah (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman guru terhadap paradigma pembelajaran baru (Siregar, 2021). Selain itu, disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan secara komprehensif (BPS, 2023). Data menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah tertinggal masih berada di bawah standar nasional, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya daya saing lulusan.

Secara teoritis, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak

hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, evaluasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (Wahyuni, 2020). Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi merupakan tahap krusial yang seringkali menjadi titik lemah dalam siklus kebijakan (Nugroho, 2021b). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan refleksi kritis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pendekatan studi kasus menjadi relevan digunakan karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan pendidikan (OECD, 2021). Kurangnya koordinasi antar lembaga serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga turut memperburuk kondisi tersebut (Hidayat, 2022). Hal ini menegaskan

bahwa perbaikan kebijakan pendidikan tidak hanya memerlukan pendekatan teknokratis, tetapi juga partisipatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia ditinjau melalui refleksi kritis dan studi kasus, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan, maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*) yang dipadukan dengan analisis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kebijakan pendidikan melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis serta realitas empiris yang terjadi di lapangan (Creswell, 2021). Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi makna, pemahaman konteks, serta eksplorasi fenomena sosial secara holistik, sehingga relevan digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan pendidikan yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2020). Data tersebut dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan (lima tahun terakhir) untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi yang digunakan

dalam analisis (Arikunto, 2020). Selain itu, studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan kebijakan transformasi pendidikan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengorganisasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkategorikan, membandingkan, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan yang komprehensif dan valid (Sugiyono, 2021).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber

data yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan mendalam. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber yang digunakan guna menghindari bias serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks yang diteliti. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang bersifat multidimensional, baik dari aspek struktural, kultural, maupun teknis operasional. Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif di tingkat pusat dengan realitas implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan seperti Kurikulum Merdeka yang secara

filosofis berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning), dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal (Suyadi, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan implementor serta kondisi lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh (Nugroho, 2021), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, keempat aspek tersebut masih menunjukkan kelemahan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Misalnya, komunikasi kebijakan yang belum merata menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antar guru terkait konsep Kurikulum Merdeka. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sarana prasarana maupun kompetensi tenaga pendidik, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil cenderung mengalami keterbatasan dalam akses teknologi, fasilitas pembelajaran, serta kualitas tenaga pendidik (Siregar, 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dalam kajian pendidikan, kondisi ini mencerminkan belum tercapainya prinsip keadilan pendidikan (*educational equity*), di mana setiap peserta didik seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (Tilaar, 2012).

Selain itu, aspek kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di kelas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan pendekatan

pembelajaran inovatif yang dituntut oleh kebijakan terbaru (Hidayat, 2022). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan profesional (Mulyasa, 2021).

Di sisi lain, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia juga masih belum berjalan secara optimal. Banyak kebijakan yang telah dirancang tidak disertai dengan mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya secara objektif (Wahyuni, 2020). Menurut teori evaluasi kebijakan, proses monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang (Dunn, 2020). Tanpa adanya evaluasi yang kuat, kebijakan cenderung bersifat administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga menjadi aspek penting yang masih perlu diperkuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, orang tua, serta sektor swasta dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan masih relatif rendah (Sari, 2021). Padahal, dalam konsep *collaborative governance*, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial dan kurang terintegrasi (Ansell, C., & Gash, 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal. Diperlukan strategi yang komprehensif dan sistematis, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan pendidikan juga perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih relevan dan aplikatif di berbagai daerah. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal (*contextual*

policy) menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Kebijakan pendidikan yang secara konseptual telah dirancang dengan baik, seperti Kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya kesiapan tenaga pendidik, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu, disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi permasalahan utama yang berdampak pada ketidakmerataan kualitas pendidikan. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan implementasi

kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi guru secara sistematis, penguatan infrastruktur pendidikan terutama di daerah tertinggal, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang berbasis data dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan. Penyesuaian kebijakan berbasis konteks lokal juga menjadi strategi penting agar kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan di masing-masing daerah.

Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris berbasis lapangan dengan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods guna memperoleh data yang lebih komprehensif terkait efektivitas kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada evaluasi spesifik terhadap program-program

pendidikan tertentu, seperti implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai jenjang pendidikan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih mendalam dan aplikatif bagi pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2020). Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research*.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- BPS. (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell. (2021). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dunn. (2020). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Hidayat. (2022). Problematika pembelajaran di era digital dan tantangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Profil Pendidikan Indonesia 2022*. Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek.
- Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021a). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021b). *Public Policy in Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- OECD. (2021). *Education in Indonesia: Rising to the*

- Challenge. OECD Publishing.
- Sari, D. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Siregar. (2021). Transformasi Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suyadi. (2022). *Pendidikan Islam dan Kurikulum Merdeka*. Deepublish.
- Tilaar. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Grasindo.
- Wahyuni. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.